JURNAL KUALITAS PENDIDIKAN
Vol. 4 No. 3 Tahun 2026, Hal. 228-237
E-ISSN: 3031-2817 | https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/jkp

Digitalisasi Administrasi Pesantren dan Perubahan Pola Komunikasi Pengasuh, Santri, dan Wali Santri

Firdaus Tina[1], Muh. Hanif[2]

[1,2]UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

Email: 254110407057@mhs.uinsaizu.ac.id[1], muh.hanif@uinsaizu.ac.id[2]

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji digitalisasi administrasi pesantren dan pergeseran komunikasi dari model tradisional tatap muka menjadi transparan, cepat, dan terdokumentasi melalui sosiologi lembaga pendidikan. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian lapangan ini menguji tiga dimensi bukti. Pertama, aplikasi administrasi yang memudahkan wali santri memantau pembayaran, perizinan, dan informasi. Kedua, kecepatan penyampaian informasi oleh pengasuh dan pengelola.Ketiga pengurangan miskomunikasi sekaligus tuntutan literasi teknologi bagi wali santri. Data dikumpulkan melalui observasi aplikasi, wawancara aktor pendidikan, dan dokumentasi kebijakan. Hasilnya diharapkan menunjukkan bagaimana relasi sosial dan otoritas membentuk praktik pendidikan, serta membangun argumen teoritis bahwa pesantren berfungsi sebagai arena sosial pemroduksi kepercayaan dan komunikasi digital. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi memperkaya diskusi sosiologi pendidikan Islam di Indonesia dan menawarkan rekomendasi tata kelola berbasis data.
Kata kunci: digitalisasi administrasi, pesantren, wali santri, komunikasi digital, literasi teknologi.

ABSTRACT

This article examines the digitalization of Islamic boarding school administration and the shift in communication from traditional face-to-face models to transparent, fast, and documented formats through the sociology of educational institutions. Using a qualitative approach, this field research examines three dimensions of evidence. First, administrative applications that make it easier for student guardians to monitor payments, permissions, and information. Second, the speed of information delivery by caregivers and managers. Third, the reduction of miscommunication alongside technological literacy demands for student guardians. Data were collected through application observations, interviews with educational actors, and policy documentation. The results are expected to show how social relations and authority shape educational practices, as well as to build a theoretical argument that pesantren function as a social arena producing trust and digital communication. Overall, this study contributes to enriching the discussion on the sociology of Islamic education in Indonesia and offers recommendations for data-based governance.
Keywords: administrative digitalization, pesantren, student guardians, digital communication, technological literacy.

PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi, peralihan ke sistem digital telah membawa perubahan besar di berbagai bidang kehidupan manusia. Pendidikan, sebagai salah satu fondasi utama kemajuan masyarakat, turut merasakan dampak positif dari perubahan tersebut. Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap dunia menjadi serba mudah, dimana mekanisme kerja yang panjang dan repetitive menjadi efektif dan efisien (Triandini & Kuswantoro, 2025). Pesantren, yang merupakan bentuk lembaga pendidikan khas dalam budaya Islam, telah lama berperan sebagai pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan. Agar tetap relevan dan dapat berfungsi secara maksimal di masa kini, pesantren pun dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Kondisi inilah yang menjadi dasar lahirnya gagasan yang dikenal sebagai "digitalisasi pesantren". Digitalisasi sistem administrasi di lingkungan pesantren membawa perubahan mendasar pada cara pengasuh, santri, dan wali santri saling berkomunikasi. Cara berinteraksi yang dulunya dilakukan secara langsung atau melalui cara konvensional, kini mulai beralih menggunakan sarana digital, sehingga mengubah pola hubungan sosial yang selama ini terjalin. Hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji dalam sosiologi pendidikan, karena berkaitan dengan bagaimana lembaga pendidikan berbasis tradisi menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi (Yanto et al., 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai digitalisasi administrasi umumnya masih bersifat deskripsi umum mengenai perubahan sistem teknis tanpa menelusuri bagaimana hubungan sosial dan pergeseran tata nilai berjalan di baliknya. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus artikel ini, di mana penelitian diarahkan untuk menguraikan penerapan sistem digital yang memudahkan pemantauan pembayaran dan perizinan, serta mempercepat distribusi informasi kebijakan pengasuh. Digitalisasi ini mengubah pola interaksi menjadi lebih terbuka karena semua data dapat ditelusuri dengan mudah, mengurangi risiko kehilangan berkas atau ketidakjelasan yang sering terjadi pada sistem manual. Tujuan penelitian ini adalah membangun argumentasi teoritik mengenai bagaimana pesantren sebagai arena sosial memproduksi kepercayaan dan perubahan sosial melalui teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan desain studi kasus yang berlokasi di Pondok Pesantren Mahasiswa An Najah, Kabupaten Banyumas. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan perpaduan nilai tradisi dengan sistem administrasi digital yang menyeluruh. Informan ditentukan melalui teknik pemilihan bertujuan (*purposive sampling*) (Hanif et al., 2023), yang meliputi pengasuh, pengurus, santri, dan wali santri untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif. Data utama diambil langsung dari hasil pengamatan di lokasi dan tanya jawab mendalam dengan pihak terkait. Sedangkan data pendukung diperoleh dari berkas-berkas resmi milik lembaga, seperti panduan pemakaian aplikasi, laporan kegiatan, dan catatan administrasi yang tersimpan (Haniyah Siregar & Albina, 2025).

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi pemadatan data (data condensation), penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan keterangan antar informan dan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai digitalisasi administrasi di Pondok Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto menunjukkan adanya perubahan dalam mekanisme pengelolaan administrasi dan pola komunikasi antara pengasuh, pengurus, santri, dan wali santri. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai sarana pelayanan administratif, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi, kecepatan penyampaian pesan, serta penyesuaian hubungan sosial di lingkungan pesantren. Digitalisasi administrasi menjadi bagian dari proses adaptasi kelembagaan pesantren terhadap perkembangan teknologi informasi tanpa harus meninggalkan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar kehidupan pesantren.

1. Digitalisasi Administrasi dan Transparansi Layanan Pesantren

Penerapan sistem administrasi digital memberikan kemudahan dalam pengelolaan berbagai kebutuhan santri, terutama berkaitan dengan pembayaran, perizinan, penyampaian informasi, dan pemantauan kegiatan pesantren. Melalui pemanfaatan aplikasi administrasi, wali santri dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan pendidikan anak tanpa harus selalu datang langsung ke lingkungan pesantren. Mekanisme tersebut memperpendek proses pelayanan yang sebelumnya bergantung pada komunikasi langsung maupun pencatatan administratif secara konvensional.

Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi digital berperan dalam meningkatkan keterbukaan pengelolaan administrasi pesantren. Informasi yang sebelumnya disampaikan melalui perantara pengurus atau komunikasi langsung mulai terdokumentasi melalui sistem digital sehingga lebih mudah ditelusuri kembali. Dokumentasi administrasi juga memungkinkan pengelola memiliki rekam informasi yang lebih teratur dalam menjalankan tugas kelembagaan. Kondisi tersebut sejalan dengan kajian Anwar et al. (2023) yang menjelaskan pemanfaatan sistem pembayaran digital sebagai salah satu bentuk inovasi administrasi di lingkungan pesantren.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, transparansi administrasi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi pelayanan, tetapi juga dengan pembentukan kepercayaan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Kemudahan memperoleh informasi memberikan ruang bagi wali santri untuk mengetahui perkembangan layanan pendidikan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebutuhan anak. Dengan demikian, digitalisasi administrasi turut mengubah hubungan kelembagaan yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada komunikasi personal menjadi hubungan yang didukung oleh dokumentasi dan keterbukaan informasi.

2. Perubahan Pola Komunikasi Pengasuh, Pengurus, Santri, dan Wali Santri

Digitalisasi administrasi turut mengubah pola komunikasi di lingkungan pesantren, khususnya dalam penyampaian informasi dan koordinasi antara pengasuh, pengurus, santri, dan wali santri. Sebelum penggunaan media digital, komunikasi administratif lebih banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, penyampaian pesan secara lisan, maupun perantara pengurus. Setelah pemanfaatan teknologi digital, penyampaian informasi dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik sehingga pesan dapat diterima secara lebih cepat dan terdokumentasi.

Perubahan tersebut terlihat pada mekanisme penyampaian kebijakan, informasi kegiatan, pemberitahuan administrasi, dan koordinasi antara pihak pesantren dengan wali santri. Informasi yang disampaikan secara digital memungkinkan penerima mengetahui isi pesan tanpa harus berada di lokasi pesantren. Selain itu, dokumentasi pesan dan riwayat pemberitahuan dapat membantu pengelola melakukan penelusuran apabila terjadi ketidakjelasan informasi.

Meskipun demikian, komunikasi digital tidak sepenuhnya menggantikan komunikasi tatap muka. Hubungan antara pengasuh dan santri tetap membutuhkan interaksi langsung karena proses pendidikan pesantren tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan akhlak, kedisiplinan, keteladanan, dan kepatuhan. Erwin dan Slamet (2023) menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dalam kehidupan pesantren, sedangkan Hanif et al. (2024) menunjukkan pentingnya mempertahankan karakter dan nilai kelembagaan pesantren dalam menghadapi perubahan pendidikan.

Dengan demikian, perubahan komunikasi di lingkungan pesantren lebih tepat dipahami sebagai pergeseran pola komunikasi dari sistem yang dominan konvensional menuju pola komunikasi hibrida, yaitu perpaduan antara komunikasi langsung dan komunikasi digital. Pola ini memungkinkan pesantren mempertahankan kedekatan sosial sekaligus memanfaatkan kecepatan teknologi dalam pengelolaan informasi.

3. Literasi Digital dan Penyesuaian Sosial Wali Santri

Temuan berikutnya berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan literasi digital bagi wali santri. Pemanfaatan aplikasi administrasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, tetapi pada saat yang sama menuntut kemampuan pengguna dalam mengoperasikan perangkat, memahami informasi digital, dan menggunakan layanan yang disediakan oleh pesantren. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Wali santri yang memiliki kemampuan menggunakan perangkat digital secara memadai akan lebih mudah memperoleh informasi mengenai administrasi dan kegiatan pendidikan anak. Sebaliknya, keterbatasan kemampuan teknologi dapat menjadi hambatan dalam mengakses layanan yang telah disediakan. Oleh sebab itu, digitalisasi berpotensi menciptakan perbedaan pengalaman pelayanan apabila tidak disertai pendampingan kepada pengguna yang mengalami kesulitan.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital memiliki dimensi sosial yang perlu diperhatikan oleh pengelola pesantren. Teknologi seharusnya tidak hanya menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan, tetapi juga menjadi sarana yang dapat diakses oleh seluruh wali santri. Humam dan Hanif (2025) menjelaskan pentingnya penyesuaian strategi pendidikan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan keterampilan pada era modern. Dalam konteks administrasi pesantren, penyesuaian tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan panduan penggunaan aplikasi, bantuan teknis, dan komunikasi alternatif bagi wali santri.

4. Sintesis Temuan Penelitian

Ketiga temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi administrasi pesantren menghasilkan perubahan yang saling berkaitan antara sistem pelayanan, pola komunikasi, dan kemampuan pengguna. Perubahan administrasi mendorong keterbukaan informasi, sedangkan penggunaan media digital mempercepat koordinasi antarpihak. Pada saat yang sama, perubahan tersebut menuntut kemampuan adaptasi teknologi agar pelayanan dapat dimanfaatkan secara merata.

Tabel 1. Sintesis Temuan Digitalisasi Administrasi dan Perubahan Sosial di Pesantren

Aspek temuan	Bentuk perubahan	Dampak terhadap kehidupan pesantren	Makna sosiologis
Administrasi digital	Pengelolaan pembayaran, perizinan, dan informasi melalui aplikasi	Pelayanan lebih mudah diakses dan terdokumentasi	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kelembagaan
Komunikasi digital	Penyampaian informasi dan kebijakan melalui media elektronik	Informasi lebih cepat diterima dan dapat ditelusuri	Perubahan pola interaksi dan koordinasi sosial
Relasi pengasuh dan wali santri	Akses informasi tidak selalu bergantung pada pertemuan langsung	Hubungan kelembagaan lebih terbuka dan responsif	Perubahan pola hubungan antara lembaga dan masyarakat
Literasi digital	Penggunaan perangkat dan aplikasi administrasi	Muncul kebutuhan pendampingan dan adaptasi teknologi	Terbentuknya tuntutan kompetensi digital baru
Nilai kelembagaan	Perpaduan komunikasi digital dan interaksi langsung	Nilai kedisiplinan, kepatuhan, dan pembinaan tetap diperlukan	Negosiasi antara tradisi pesantren dan modernisasi

Pembahasan

1. Digitalisasi Administrasi sebagai Transformasi Tata Kelola Pesantren

Digitalisasi administrasi di Pondok Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi telah mendorong perubahan dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam. Penggunaan aplikasi administrasi tidak hanya menggantikan pencatatan manual, tetapi juga mengubah mekanisme pengelolaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat pesantren. Proses administrasi yang sebelumnya lebih bergantung pada komunikasi langsung mulai berkembang menjadi sistem yang mengutamakan dokumentasi, keterbukaan, dan kemudahan akses.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa transformasi digital dalam pendidikan perlu dipahami sebagai perubahan sistem kelembagaan, bukan sekadar penggunaan perangkat teknologi. Anwar et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran digital di pesantren merupakan salah satu bentuk inovasi yang mendukung pengelolaan administrasi. Sementara itu, Yanto et al. (2023) menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari penyesuaian lembaga pendidikan Islam terhadap perkembangan teknologi informasi.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, perubahan tersebut dapat dipahami melalui hubungan antara struktur kelembagaan dan tindakan sosial para pelakunya. Pengasuh dan pengurus memiliki tanggung jawab dalam mengelola sistem, sedangkan santri dan wali santri menjadi bagian dari masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Digitalisasi kemudian membentuk mekanisme hubungan yang lebih terstruktur karena informasi dan aktivitas administratif memiliki dokumentasi yang dapat diakses sesuai kewenangan masing-masing.

Pemikiran Plummer (2021) mengenai perubahan sosial memberikan landasan untuk memahami bahwa perkembangan masyarakat berkaitan dengan perubahan pola interaksi, hubungan, dan praktik sosial. Dalam konteks penelitian ini, teknologi menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan cara warga pesantren berhubungan dengan lembaga. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak cukup dinilai dari kecepatan pelayanan, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan dan meningkatkan tanggung jawab kelembagaan.

2. Perubahan Komunikasi dan Rekonstruksi Hubungan Sosial Pesantren

Perubahan pola komunikasi merupakan salah satu konsekuensi penting dari penerapan administrasi digital. Komunikasi yang sebelumnya lebih banyak berlangsung melalui interaksi langsung kini didukung oleh media elektronik yang memungkinkan penyampaian informasi secara cepat dan terdokumentasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah memperluas ruang komunikasi antara pengasuh, pengurus, santri, dan wali santri.

Manurung dan Manurung (2023) menjelaskan bahwa efektivitas komunikasi berkaitan dengan berlangsungnya pertukaran informasi dua arah dan adanya umpan balik dari penerima pesan. Dalam konteks pesantren, prinsip tersebut menjadi penting karena komunikasi tidak hanya bertujuan menyampaikan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa informasi dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Dengan

adanya media digital, wali santri dapat memperoleh informasi secara lebih mudah, sedangkan pengelola memiliki sarana untuk menyampaikan pemberitahuan secara serentak.

Namun, kecepatan penyampaian pesan tidak secara otomatis menjamin efektivitas komunikasi. Informasi yang diterima perlu dipahami, dikonfirmasi, dan ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Hanif dan Salsabillah (2024) mengingatkan bahwa perkembangan media digital juga menghadirkan persoalan verifikasi informasi dan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengelola pesantren perlu memastikan bahwa informasi administratif berasal dari saluran resmi dan memiliki mekanisme klarifikasi.

Hal yang menarik adalah bahwa digitalisasi tidak menghilangkan kedudukan pengasuh sebagai figur otoritatif dalam kehidupan pesantren. Sebaliknya, media digital dapat memperluas jangkauan penyampaian arahan dan kebijakan pengasuh. Meskipun demikian, otoritas tersebut tetap memerlukan legitimasi sosial yang dibangun melalui keteladanan, pembinaan, dan interaksi langsung. Dengan demikian, komunikasi digital dan komunikasi interpersonal memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mempertahankan hubungan sosial pesantren.

3. Literasi Digital sebagai Prasyarat Pemerataan Pelayanan

Digitalisasi administrasi juga menghadirkan konsekuensi berupa meningkatnya kebutuhan literasi digital di kalangan wali santri. Ketersediaan aplikasi tidak selalu menjamin bahwa semua pengguna dapat mengakses layanan secara optimal. Kemampuan menggunakan perangkat, memahami petunjuk aplikasi, mengelola informasi, dan menjaga keamanan akun menjadi bagian penting dari proses adaptasi terhadap sistem administrasi digital.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara teknologi dan kesetaraan akses pelayanan. Wali santri yang memiliki keterampilan digital lebih baik cenderung lebih mudah memanfaatkan layanan yang tersedia. Sebaliknya, pengguna yang mengalami keterbatasan kemampuan teknologi membutuhkan dukungan tambahan. Apabila persoalan ini tidak diperhatikan, digitalisasi justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru dalam hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan administrasi digital perlu disertai kebijakan pendampingan pengguna. Pesantren dapat menyediakan panduan penggunaan aplikasi, layanan konsultasi administratif, serta alternatif komunikasi langsung bagi wali santri yang mengalami kendala. Langkah tersebut penting agar teknologi berfungsi sebagai instrumen pemerataan pelayanan, bukan menjadi hambatan baru bagi kelompok pengguna tertentu.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, literasi digital dapat dipahami sebagai kemampuan sosial yang memengaruhi partisipasi seseorang dalam kehidupan kelembagaan. Wali santri tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi

juga sebagai pengguna aktif yang perlu memahami sistem administrasi dan berinteraksi melalui media digital. Dengan demikian, digitalisasi turut mengubah bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren.

4. Negosiasi antara Tradisi Pesantren dan Modernisasi Teknologi

Digitalisasi administrasi memperlihatkan adanya proses penyesuaian antara karakter tradisional pesantren dan tuntutan modernisasi. Pesantren memiliki sistem sosial yang dibangun melalui hubungan antara pengasuh, pengurus, santri, dan masyarakat. Hubungan tersebut tidak hanya didasarkan pada kepentingan administratif, tetapi juga mengandung nilai kepatuhan, penghormatan, tanggung jawab, dan pembinaan akhlak.

Penggunaan teknologi digital menghadirkan pola kerja baru yang lebih cepat, terdokumentasi, dan terorganisasi. Namun, perubahan tersebut tidak berarti seluruh mekanisme tradisional harus ditinggalkan. Interaksi langsung tetap memiliki peranan penting dalam membangun kedekatan emosional, menyelesaikan persoalan interpersonal, dan menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. Hal ini sejalan dengan pembahasan Hanif et al. (2024) mengenai pentingnya mempertahankan karakter kelembagaan pesantren dalam menghadapi perubahan sistem pendidikan.

Dengan demikian, proses digitalisasi di pesantren lebih tepat dipahami sebagai negosiasi antara tradisi dan modernitas. Teknologi diterima sepanjang dapat mendukung kebutuhan kelembagaan tanpa menghilangkan prinsip pendidikan yang menjadi identitas pesantren. Perpaduan tersebut menghasilkan pola tata kelola yang tidak sepenuhnya konvensional, tetapi juga tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi digital.

5. Model Konseptual Perubahan Sosial melalui Digitalisasi Administrasi Pesantren

Berdasarkan sintesis hasil penelitian dan pembahasan, digitalisasi administrasi pesantren dapat dijelaskan melalui hubungan antara penerapan teknologi, perubahan mekanisme pelayanan, transformasi komunikasi, dan penyesuaian sosial. Penerapan aplikasi menjadi titik awal perubahan, kemudian mendorong keterbukaan administrasi dan percepatan komunikasi. Selanjutnya, perubahan tersebut menuntut peningkatan literasi digital serta penyesuaian hubungan antara pengasuh, santri, dan wali santri.



Gambar 1. Model Konseptual Transformasi Sosial melalui Digitalisasi Administrasi Pesantren

Model tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi memiliki dua jalur perubahan utama, yaitu transparansi pelayanan dan transformasi komunikasi. Kedua jalur tersebut kemudian bertemu pada kebutuhan adaptasi sosial dan peningkatan literasi digital. Hasil akhirnya adalah terbentuknya tata kelola pesantren yang memadukan efisiensi teknologi dengan keberlanjutan nilai-nilai kelembagaan.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada pemahaman digitalisasi administrasi sebagai proses perubahan sosial dalam lembaga pendidikan Islam. Teknologi tidak hanya diposisikan sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai sarana yang membentuk ulang mekanisme hubungan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, keberhasilan transformasi tersebut tetap bergantung pada kemampuan pesantren menjaga keseimbangan antara kemudahan layanan digital, pemerataan akses, dan kualitas interaksi interpersonal.

KESIMPULAN

Digitalisasi administrasi di Pesantren Mahasiswa An Najah telah membentuk tatanan sosial baru yang transparan melalui integrasi aplikasi pemantauan dan percepatan distribusi informasi. Meskipun sistem ini efektif mengurangi miskomunikasi dan memperkuat nilai-nilai kelembagaan, keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat literasi teknologi wali santri sebagai penghubung utama dalam ekosistem pendidikan digital. Penelitian ini menyarankan adanya studi komparatif antara pesantren tradisional dan modern di masa depan serta penggunaan metode campuran (*mixed methods*) (Rudianto, 2025) untuk mengukur dampak sosial ini secara lebih objektif dan menyeluruh. Konsep Digitalisasi Administrasi,

Komunikasi Pesantren, dan Literasi Teknologi Wali Santri terbukti sangat tepat dan berguna untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Ketiga konsep ini menjadi alat bantu yang mengubah peristiwa teknis menjadi fenomena sosial yang mudah dipahami, sehingga digitalisasi tidak lagi hanya dilihat sebagai alat kerja, tapi juga pembentuk hubungan, aturan, dan kebiasaan baru. Selain itu, pemakaian metode studi kasus kualitatif sangat berperan besar, karena memungkinkan peneliti menggali makna di balik setiap tindakan, memahami pengalaman pihak-pihak terkait, serta menangkap detail cara kerja hubungan sosial yang sulit diukur dengan angka. Metode ini berhasil mengungkapkan bagaimana perubahan sistem mengubah perilaku dan cara pandang, sehingga masalah penelitian mengenai dampak sosial digitalisasi bisa dijelaskan secara mendalam, rinci, dan sesuai kenyataan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, H. S., Denata, R., & Firdaus, A. I. I. (2023). Digitalisasi Pendidikan Pesantren melalui Sistem Pembayaran Cashless Menggunakan Ngabar Smart Payment di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(1), 43–53.

Erwin, & Slamet, M. (2023). *Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Gaza Al-Islami Bogor*. *2*(1).

Hanif, M., Dharin, A., & Hutauruk, M. E. (2023). Management of Social Entrepreneurship in Indonesian Islamic Boarding Schools. *Pegem Journal of Education and Instruction*, *13*(3), 375–385.

Hanif, M., Mukroji, Suwito, H., Mubaroq, A. C., & Dharin, A. (2024). Pesantren Resistance To Indonesia'S National Curriculum To Defend Its Curriculum Model. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, *18*(7), 1–32.

Hanif, M., & Salsabillah, N. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan, Artikel Pendidikan Kewarganegaraan. *Pendidikan Kewarganegaraan*, *11*(2), 273–307.

Haniyah Siregar, R., & Albina, M. (2025). Menjelaskan Cara Menganalisis Data Dalam Penelitian Pendidikan. *Jma)*, *3*(6), 1–14.

Humam, M. S., & Hanif, M. (2025). Strategi Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Keterampilan Kritikal Siswa di Era Modern. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, *3*(3), 89–108.

Kholidin, & Hanif, M. (2025). Efisiensi Anggaran Dalam Manajemen Keuangan Sekolah Di Daerah Terpencil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(4), 452–473.

Manurung, P., & Manurung, A. S. (2023). *KomunikA*. *00*(00), 42–47.

Plummer, K. (2021). *Sociology; The Basics; Third Edition*. Routledge.

Rudianto, P. (2025). *Metodelogi Penelitian Mix Method Menggunakan Smartpls dan Nvivo* (N. Giskha, Ed.).

Triandini, R. A. N., & Kuswantoro, A. (2025). Digitalisasi Administrasi Akademik untuk Pelayanan Efektif dan Efisien. In *Book Chapter Administrasi Perkantoran Jilid 1*.

Yanto, A. N., Abdullah, W., & Zulfikri, M. (2023). No. *Jurnal Pendidikan Islam*, *16*(2), 132–144.